

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia memiliki keindahan yang luar biasa, namun selain dari keindahan alam yang dimiliki ternyata keindahan tersebut mempunyai daya tarik yang sangat menakjubkan. Selain dari keindahan alam sendiri, kekayaan budaya yang dimiliki Indonesia pun juga sangat beragam. Kebudayaan yang dimilikinya pun mempunyai keunikan dan juga kekhasan yang tidak dimiliki oleh negara lain, dan bahkan membuat negara lain iri akan kekayaan dan juga keindahan budaya yang dimiliki Indonesia. Indonesia sendiri mempunyai ribuan peninggalan bersejarah yang mana telah diputuskan sebagai suatu cagar budaya yang tersebar di seluruh Nusantara (Purwanto, 2021).

Cagar budaya adalah hasil kebudayaan manusia sebagai suatu cerminan tingkah laku dan juga pola masyarakat pada zamannya, yang merupakan gambaran kebudayaan bangsa Indonesia pada masa lampau (BPCB Sumbar). Setiap daerah seharusnya telah mengenali dan juga melakukan upaya pelestarian terhadap suatu cagar budaya, sehingga setiap daerah pun juga memiliki ciri khas ataupun karakter yang berbeda pula dengan daerah lain, karena mempunyai latar belakang dengan nilai yang terdapat pada cagar budaya yang berbeda pula. Cagar budaya harus secara bersama-sama dan sungguh-sungguh dijaga dan dipelihara, dilestarikan, dikembangkan dan juga dimanfaatkan.

Undang-Undang Republik Indonesia No.11 Tahun 2010 telah menjelaskan mengenai pelestarian cagar budaya, yang pada hakekatnya merupakan suatu upaya

yang bertujuan guna mempertahankan eksistensi suatu cagar budaya dan juga nilai penting dengan berbagai cara seperti melindungi, mengembangkan dan memanfaatkannya. Pelestarian bangunan dan lingkungan cagar budaya di Indonesia sendiri menjadi suatu tema yang penting dan mulai berkembang pada tahun 1990 dalam suatu penataan ruang di Indonesia sendiri (Wirastari, 2012:63). Pengelolaan sendiri merupakan suatu upaya yang terstruktur guna melindungi, mengembangkan serta memanfaatkan cagar budaya sendiri melalui prosedur pengaturan pada perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan yang seluruhnya digunakan untuk kesejahteraan rakyat. Pelestarian adalah suatu upaya yang bermaksud untuk mempertahankan keberadaan Cagar Budaya dan nilai penting dengan cara melindungi, mengembangkan dan juga manfaatkannya (Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya, 2010).

Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya menyebutkan bahwa:

- a. Perlindungan adalah upaya mencegah dan menanggulangi dari kerusakan, kehancuran atau kemusnahan dengan cara Penyelamatan, Pengamanan, Zonasi, Pemeliharaan, dan Pemugaran Cagar Budaya.
- b. Pengembangan adalah peningkatan potensi nilai, informasi, dan promosi Cagar Budaya serta pemanfaatannya melalui Penelitian, Revitalisasi, dan Adaptasi secara berkelanjutan serta tidak bertentangan dengan tujuan Pelestarian.

- c. Pemanfaatan adalah pendayagunaan Cagar Budaya untuk kepentingan sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat dengan tetap mempertahankan kelestariannya.

Menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, landasan yang mendasari konsep pelestarian itu sendiri adalah bahwa nilai cagar budaya dapat ditingkatkan melalui beberapa cara, yaitu melindungi, memajukan, dan juga memanfaatkannya. Pengembangan Cagar Budaya dilakukan dengan memperhatikan prinsip kemanfaatan, keamanan, keterawatan, keaslian, dan nilai-nilai yang melekat padanya. Pengembangan Cagar Budaya dapat diarahkan untuk memacu pengembangan ekonomi yang hasilnya digunakan untuk Pemeliharaan Cagar Budaya dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pada Laporan Kajian Pemanfaatan KCB Muara Jambi disebutkan bahwa Kawasan Cagar Budaya Muara Jambi telah ditetapkan sebagai Cagar Budaya Tingkat Nasional pada tahun 2013 melalui Surat Keputusan Kemdikbud No 259/M/2013 tentang satuan Ruang Geografis Muara Jambi sebagai suatu Kawasan Cagar Budaya Peringkat Nasional. Muara Jambi terus bertransformasi dan membangun citra sebagai Kawasan Cagar Budaya dan Lokasi wisata unggulan yang berada di Kabupaten Muaro Jambi dan Provinsi Jambi

Pelaksanaan perlindungan Kawasan Cagar Budaya Muara Jambi di manifestasikan melalui adanya pengamanan serta melindungi seluruh bentuk tinggalan budaya yang ada, termasuk juga pemanfaatannya. Pemanfaatan Kawasan Cagar Budaya Muara Jambi sendiri dapat dimanfaatkan dalam berbagai kepentingan, seperti kepentingan pendidikan yaitu untuk studi lapangan siswa

sekolah, upacara ritual seperti peringatan hari besar waisak, konservasi alam seperti budidaya ikan ataupun perlindungan satwa yang ada disekitar kawasan, kegiatan-kegiatan seni dan budaya, serta aktivitas lain dengan memerlukan koordinasi pada pelayanan juga perlindungan maupun keamanan cagar budaya di dalam kawasan. Pelayanan pemanfaatan terus berupaya ditingkatkan sehingga untuk diberikan kepada pengunjung. Upaya pelayanan ini diberikan mulai dari izin melakukan kegiatan pemanfaatan baik berupa kunjungan wisata, penelitian, pendidikan, keagamaan. Aktivitas pemanfaatan yang berlangsung di Kawasan Cagar Budaya Muara Jambi juga diupayakan dapat memberikan efek ekonomi dan kesejahteraan kepada masyarakat. Program dampingan untuk peningkatan kapasitas masyarakat coba disinergikan dengan *stakeholder* lainnya. Sehingga segala aktivitas pemanfaatan yang berlangsung juga dapat memberikan manfaat kepada masyarakat.

Pemangku kepentingan yang memiliki tugas pokok dan fungsi atau tupoksi dalam pengelolaan kawasan cagar budaya adalah pemerintah pusat, dalam hal ini tupoksi nya terbagi atas Balai Pelestarian Kebudayaan (BPK) Wilayah V yang merupakan representasi dari pemerintah pusat itu sendiri. Tupoksi utama ada ditangan pemerintah pusat yaitu melalui BPK wilayah V, namun KCBN ini juga ada irisan nya tupoksi pemerintah daerah dan pemerintah kabupaten dalam urusan pengelolaan kegiatan pariwisata. Adapun masyarakat sekitar kawasan pun dipandang penting partisipasi nya mengingat mereka lah sejatinya harus menjadi pemanfaat utama pembangunan. Cohen dan Uphoff (1977) menyatakan bahwa setiap pembangunan masyarakat lah yang menjadi pemanfaat utama.

Setiap pembangunan seyogyanya pemerintah memberi perhatian untuk tujuan perbaikan hidup masyarakat. Sebaliknya juga masuk akal manakala masyarakat mengharapkan adanya manfaat kehadiran pembangunan untuk perbaikan kehidupan mereka. Atas dasar logika itu pulalah maka kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat menjadi amat penting dalam pembangunan sebagaimana partisipasi masyarakat pun amat berarti dalam pengelolaan dan tujuan keberlanjutan dari suatu pembangunan.

Menurut data Laporan Bulanan Kegiatan Proyek Pemugaran dan Pemeliharaan Peninggalan Sejarah dan Purbakala Jambi. Dalam kasus KCBN sejak tahun 1978 masyarakat Desa Muara Jambi telah dilibatkan dalam program pengelolaan kawasan ini, sedangkan masyarakat Desa Danau Lamo, Desa Kemingking Luar dan Desa Baru dilibatkan pada tahun 1987. Bentuk keikutsertaan mereka meliputi sebagai tenaga kerja pemugaran dan tenaga kebersihan lokasi (juru pelihara lokasi candi). Dukungan masyarakat dalam upaya pengembangan situs sebagai kawasan wisata sejak lama telah mendapatkan dukungan.

Sekurang-kurangnya ada empat desa yang tercatat telah terlibat dalam program sejak tahun 1978, keempat desa tersebut adalah Desa Muara Jambi, Desa Danau Lamo, Desa Kemingking Luar dan Desa Dusun Baru yang mengharapkan kesempatan untuk bisa berpartisipasi dalam upaya tersebut. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya pasal 73 yang menjelaskan mengenai zonasi, bahwasanya sistem zonasi terdiri dari zona inti, zona penyangga, zona pengembangan dan zona penunjang. Ke-4 desa tersebut merupakan suatu area yang luas dan juga dijadikan sebagai area utama atau zona inti dari KCBN Muara

Jambi itu sendiri, dan dua desa lainnya dijadikan sebagai area atau zona penunjang KCBN Muara Jambi. Selain itu pada empat desa utama tadi dijadikan sebagai pusat pariwisata dari KCBN itu sendiri. Sehingga secara tidak langsung kolaborasi masyarakat lebih terlihat di empat desa tersebut.

Empat desa tersebut yaitu Desa Muara Jambi, Desa Danau Lamo, Desa Baru dan Desa Kemingking Luar memiliki perjanjian untuk selalu melestarikan dan terlibat dalam setiap pembangunan di KCBN Muara Jambi itu sendiri, perjanjian tersebut dinamakan “*Sekok Suaro Saiyo Sekato*”. Perjanjian ini pun dibuat dan diresmikan pada tanggal 6 Agustus 2023, yang tertanda tangan oleh ke-4 kepala desa, ke-4 ketua lembaga adat serta kepala BPK Wilayah V Jambi.

Pada Laporan Sejarah Situs Muara Jambi oleh Retno Purwanti (Balai Arkeologi Palembang) menyatakan bahwa keterlibatan mereka secara langsung maupun tidak langsung telah tercatat sejak tahun 1976 ketika pertama kalinya situs Muara Jambi dibuka dan dipugar, dimana sebagian mereka secara sukarela ikut membantu proses pembersihan vegetasi hutan yang menutup bangunan-bangunan kuno. Di dalam hati Masyarakat terbesit rasa bangga dan bersyukur bahwa tinggalan-tinggalan itu berada di lingkungan desa mereka (Asnia, 2021:43). Tidak ada pelindung yang lebih baik daripada masyarakat desa yang bermukim di dekat situs. Oleh karena itu melibatkan mereka dalam proses pengembangan situs menjadi sangat penting dan memiliki nilai strategis yang tidak dapat diabaikan.

Berdasarkan hasil observasi awal penulis mendapatkan informasi bahwa agenda yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi di bawah naungan Direktorat Jendral Kebudayaan adalah Revitalisasi

Kawasan Cagar Budaya Nasional (KCBN) Muara Jambi. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya Revitalisasi potensi Situs Cagar Budaya atau Kawasan Cagar Budaya memperhatikan tata ruang, tata letak, fungsi sosial, dan/atau lanskap budaya asli berdasarkan kajian. Revitalisasi dilakukan dengan menata kembali fungsi ruang, nilai budaya, dan penguatan informasi tentang Cagar Budaya. Revitalisasi KCBN Muara Jambi ini diinisiasi untuk upaya dalam mendorong pengakuan serta usulan Muara Jambi menjadi situs Warisan Dunia UNESCO. Pengelolaan KCBN Muara Jambi akan menerapkan konsep harmonisasi dengan ekosistem alam di sekitarnya.

Revitalisasi KCBN Muara Jambi ini menjadi langkah tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 mengenai Pemajuan Kebudayaan. Pada UU tersebut. Terdapat dua hal yang diarahkan, yaitu berkaitan dengan ketahanan budaya serta kontribusi budaya Indonesia di tengah peradaban dunia. Pelestarian KCBN Muara Jambi ini tidak hanya fokus pada cagar budayanya saja, namun juga bagaimana mengembangkan perlindungan alam dan lingkungan.

Revitalisasi Kawasan Cagar Budaya Nasional (KCBN) Muara Jambi ini tidak mengarah pada pembangunan gedung-gedung permanen. Revitalisasi kawasan seluas kurang lebih 4.000 Hektar ini akan diseimbangkan dengan pelestarian ekosistem disekitarnya. Sehingga bukan hanya menyelamatkan cagar budaya secara fisik saja. Namun, juga melindungi ekosistem di sekitarnya karena menjadi bagian yang tidak bisa dipisahkan dari kawasan. Pemberdayaan masyarakat juga menjadi hal-hal yang penting dalam mendorong revitalisasi ini.

Bukan hanya menjadikan masyarakat sebagai pekerja, mentransfer pengetahuan dari sejumlah ahli kepada masyarakat juga menjadi tujuan utama.

Dihadirkannya program-program kolaborasi yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat juga salah satu faktor pendukung revitalisasi ini. Program ini diinisiasi pihak pengelola dan masyarakat sekitar. Program ini memanfaatkan sumber daya alam dan juga sumber daya manusia yang dimiliki dari desa tersebut. Dengan harapan hadirnya program ini dapat mencapai tujuan untuk melindungi ekosistem disekitar kawasan.

Sayangnya studi kajian mengenai studi-studi kolaborasi yang mendalam terutama berfokus kepada revitalisasi kawasan cagar budaya lebih banyak di sektor sumber daya alam dan lingkungan seperti penelitian dari Baswantara (2023) “Kolaborasi Bersama Masyarakat Dalam Upaya Revitalisasi Kawasan Mangrove Bulaksetra, Pangandaran, Jawa Barat”, penelitian dari Kariem dan Afrijal (2021) “Collaborative Governance pada Revitalisasi Sungai Sekanak di Kota Palembang” dan lain sebagainya.

Oleh sebab itulah maka peneliti tertarik memfokuskan penelitian mengenai kolaborasi masyarakat dalam upaya revitalisasi cagar budaya. Namun memang masih sedikit sekali, yang meneliti kolaborasi masyarakat dengan pemerintah di bidang revitalisasi pada sektor cagar budaya maka dari itulah penelitian ini dilakukan. Dari latar belakang yang telah dijabarkan berikut, penulis ingin mengetahui dan menjelaskan bagaimana kolaborasi masyarakat sekitar dalam mengoptimalkan program dalam upaya Revitalisasi Kawasan Cagar Budaya Nasional (KCBN) Muara Jambi. Sehingga penulis pun mengambil judul yaitu “Pola

“Kolaborasi Masyarakat Dalam Upaya Revitalisasi Cagar Budaya: Studi Kasus Kawasan Cagar Budaya Nasional (KCBN) Muara Jambi”

B. Perumusan Masalah

Dewasa ini kolaborasi masyarakat semakin dipandang penting apalagi untuk pembangunan dalam melestarikan cagar budaya, termasuk seperti dalam kasus upaya pelestarian KCBN Muara Jambi. Pemerintah melalui Balai Pelestarian Kebudayaan (BPK) Wilayah V selaku *stakeholder* utama sebenarnya melakukan praktek pembangunan ini, yaitu melibatkan masyarakat dalam program revitalisasi untuk melestarikan Kawasan Cagar Budaya Nasional (KCBN) Muara Jambi. Hadirnya revitalisasi ini juga mendorong pengakuan serta usulan Muara Jambi untuk menjadi situs Warisan Dunia UNESCO. Disisi lain masyarakat pun tampak juga semakin menyadari pentingnya mereka berpartisipasi dalam pelestarian cagar budaya. Masyarakat sekitar kawasan KCBN sudah ada yang menjadi pemanfaat pembangunan seperti menjadi pekerja pemugaran, mendapatkan pelatihan-pelatihan, menjadi pedagang kecil dan mendapatkan sumber penghidupan dari pelestarian KCBN sendiri.

Kajian tentang partisipasi sosial dan pembangunan secara khusus tentang kolaborasi masyarakat dalam pembangunan adalah merupakan salah satu kajian yang menarik dalam ilmu antropologi. Dengan menggunakan teori antropologi pembangunan akan dapat dipetakan atau dipelajari bagaimana pengertian partisipasi masyarakat, bentuk-bentuk partisipasi, ciri-ciri atau karakteristik partisipasi, dan faktor penyebab timbulnya partisipasi. Di mana partisipasi

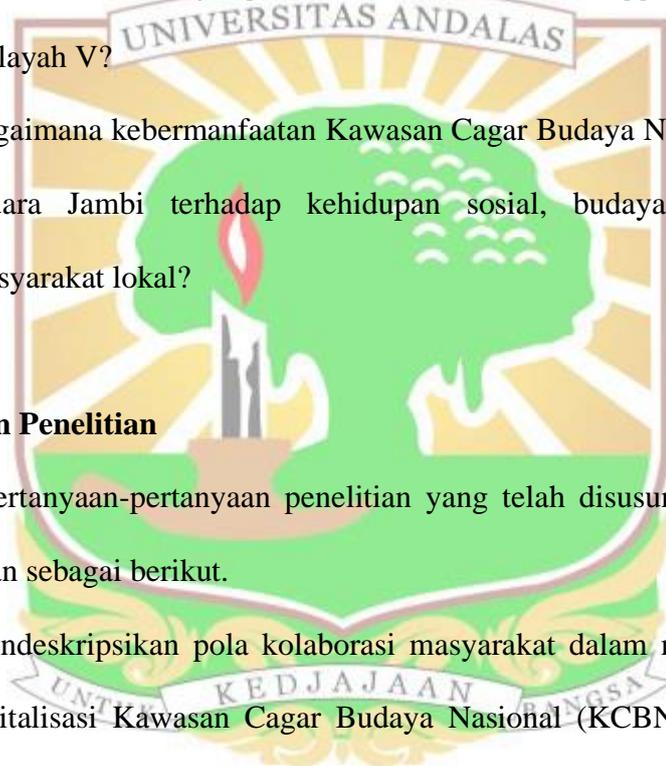
masyarakat itu adalah konsep yang lebih luas dari kolaborasi. Dimana kolaborasi masyarakat adalah bagian dari partisipasi masyarakat. Untuk itu melalui penelitian ini memfokuskan pada upaya mempelajari lebih mendalam tentang pertanyaan berikut ini

1. Bagaimana pola kolaborasi masyarakat dalam mengoptimalkan revitalisasi Kawasan Cagar Budaya Nasional (KCBN) Muara Jambi secara kolaboratif yang diinisiasi oleh Badan Peninggalan Kebudayaan Wilayah V?
2. Bagaimana kebermanfaatan Kawasan Cagar Budaya Nasional (KCBN) Muara Jambi terhadap kehidupan sosial, budaya dan ekonomi masyarakat lokal?

C. Tujuan Penelitian

Dari pertanyaan-pertanyaan penelitian yang telah disusun, maka penulis memiliki tujuan sebagai berikut.

1. Mendeskripsikan pola kolaborasi masyarakat dalam mengoptimalkan revitalisasi Kawasan Cagar Budaya Nasional (KCBN) Muara Jambi secara kolaboratif yang diinisiasi oleh Badan Peninggalan Kebudayaan Wilayah V
2. Mendeskripsikan kebermanfaatan Kawasan Cagar Budaya Nasional (KCBN) Muara Jambi terhadap kehidupan sosial, budaya dan ekonomi masyarakat lokal



D. Manfaat Penelitian

Hasil yang didapatkan dari penelitian ini nantinya diharapkan dapat memiliki manfaat sebagai berikut:

1. Hasil dari penelitian diharapkan dapat bermanfaat untuk studi mengenai partisipasi masyarakat serta diharapkan menambah ilmu pengetahuan bagi peneliti dan juga peneliti lain tentang partisipasi masyarakat yang menggunakan pendekatan kolaboratif pada upaya pelestarian cagar budaya
2. Penelitian ini diharapkan bisa menjadi informasi dan lanjutan guna untuk acuan penelitian berikutnya mengenai program kolaborasi pelestarian kawasan cagar budaya, sehingga diharapkan dapat memotivasi kawasan cagar budaya lain untuk mengikutsertakan partisipasi serta kolaborasi bersama masyarakat sekitar guna mengelaborasi potensi yang dimiliki.
3. Memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan studi S1 di Departemen Antropologi Sosial Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik.

E. Tinjauan Pustaka

1. Penelitian Terdahulu

Pada penelitian ini, penulis merujuk pada penelitian terdahulu. Penelitian pertama yaitu dari Baswantara et.al (2023) berjudul “*Kolaborasi Bersama Masyarakat Dalam Upaya Revitalisasi Kawasan Mangrove Bulaksetra, Pangandaran, Jawa Barat.*” Penelitian ini dilakukan di Kawasan Mangrove Bulaksetra yang berada di wilayah Desa Babakan, Kecamatan Pangandaran. Jurnal

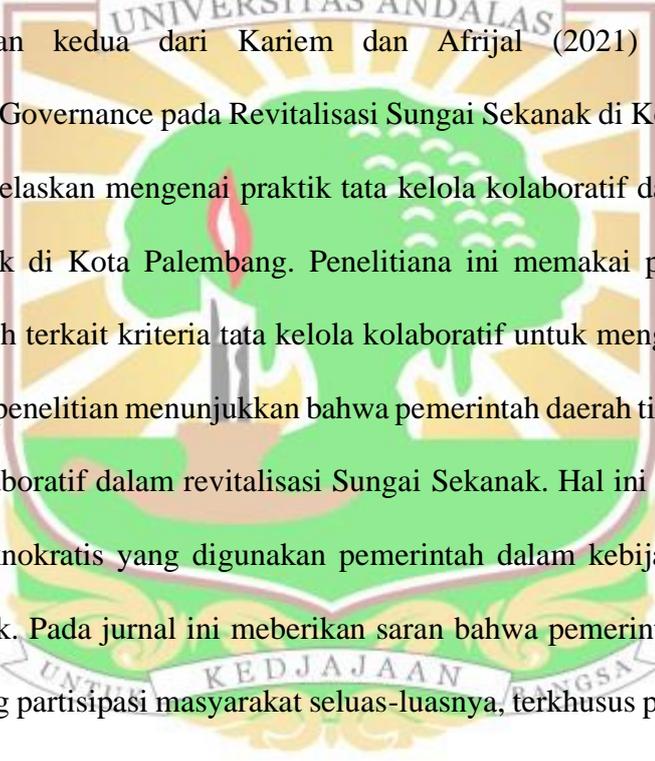
ini membahas bagaimana upaya revitalisasi Kawasan Mangrove Bulaksetra. Sejak tahun 2017 kawasan ini mengalami alih fungsi lahan sehingga memerlukan revitalisasi khususnya mengembalikan vegetasi mangrove serta vegetasi pesisir lainnya.

Tujuan penelitian ini adalah untuk membantu Kelompok Penggerak dan Pengelola Kawasan Pesisir Bulaksetra (KPPKP-Bulaksetra) pada proses revitalisasi kawasan mangrove melewati program pengabdian kepada masyarakat. Program dilaksanakan dalam kurun waktu enam bulan dengan enam tahapan kegiatan:

1. Sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat
2. Pembentukan kelompok kerja
3. Penyiapan bibit dan sarana prasarana
4. Penanaman mangrove
5. Pemeliharaan mangrove
6. Monitoring dan evaluasi

Hasil dari penelitian ini memperlihatkan bahwa program pengabdian ini memberikan manfaat bagi masyarakat, serta program ini terus dilanjutkan sampai proses revitalisasi memperlihatkan perkembangan. Kolaborasi bersama masyarakat memberikan arti yang sangat penting dalam upaya revitalisasi kawasan mangrove. Penting sekali untuk melibatkan masyarakat dalam setiap tahapan kegiatan, mulai dari perencanaan sampai tahap pelaksanaan. Dilibatkannya masyarakat diharapkan program dapat berjalan secara berkelanjutan serta memberikan manfaat untuk semua pihak

Kekuatan dari penelitian diantara lain: Jurnal ini menggambarkan mengenai pentingnya kolaborasi dengan masyarakat dalam upaya revitalisasi kawasan mangrove. Program pengabdian masyarakat dilaksanakan secara terstruktur dan juga sistematis. Hasil penelitian pun memperlihatkan bahwa program ini memberikan banyak sekali manfaat bagi masyarakat. Kelemahannya adalah Pada jurnal ini tidak membahas secara mendalam mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan program revitalisasi



Penelitian kedua dari Kariem dan Afrijal (2021) yang berjudul “Collaborative Governance pada Revitalisasi Sungai Sekanak di Kota Palembang.” Jurnal ini menjelaskan mengenai praktik tata kelola kolaboratif dalam revitalisasi Sungai Sekanak di Kota Palembang. Penelitian ini memakai pendekatan teori Ansell dan Gash terkait kriteria tata kelola kolaboratif untuk menganalisis praktik tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah daerah tidak menerapkan tata kelola kolaboratif dalam revitalisasi Sungai Sekanak. Hal ini disebabkan oleh pendekatan teknokratis yang digunakan pemerintah dalam kebijakan revitalisasi Sungai Sekanak. Pada jurnal ini memberikan saran bahwa pemerintah daerah perlu membuka ruang partisipasi masyarakat seluas-luasnya, terkhusus pada isu-isu yang bersinggungan langsung terhadap masyarakat. Penting untuk mewujudkan tata kelola kolaboratif yang efektif dan juga berkelanjutan dalam revitalisasi Sungai Sekanak

Kekuatan dari penelitian ini diantaranya, Jurnal ini menggambarkan jelas mengenai konsep tata kelola kolaboratif. Pada penelitian ini pun memakai metodologi yang tepat untuk menganalisis praktik tata kelola kolaboratif dalam

revitalisasi Sungai Sekanak. Serta kelemahan nya adalah Pada jurnal ini tidak membahas secara dalam mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi tata kelola kolaboratif.

Penelitian ketiga dari Anggraini et al (2022) berjudul “*Analisis Collaborative Governance dalam Penyelenggaraan Musyawarah Rencana Pembangunan Desa Sungai Rambutan*”. Jurnal ini membahas mengenai bagaimana analisis penyelenggaraan Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes) di Desa Sungai Rambutan, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah pada perspektif Collaborative Governance. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pada hasil dijelaskan bahwa penyelenggaran Musrenbangdes di Desa Sungai Rambutan belum maksimal. Ini disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu:

- Minimnya sosialisasi dan pengetahuan terkait Musrenbangdes
- Kurangnya partisipasi masyarakat
- Tidak terselenggaranya serap aspirasi dalam bentuk musyawarah bertingkat dari level dusun
- Lemahnya koordinasi dan kolaborasi antar stakeholder

Pelaksanaan Musrenbangdes di Desa Sungai Rambutan perlu dioptimalkan menggunakan prinsip-prinsip Collaborative Governance. Ini dapat di implementasikan dengan meningkatkan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, mendorong partisipasi masyarakat, menyelenggarakan musyawarah bertingkat dari level dusun, serta memperkuat koordinasi dan kolaborasi antar stakeholder.

Kekuatan dari jurnal ini yaitu Pada jurnal ini menggambarkan dengan jelas mengenai konsep *Collaborative Governance*. Pada penelitian ini memakai metodologi yang tepat untuk menganalisis penyelenggaraan Musrenbangdes dalam perspektif *Collaborative Governance*. Pada hasil pun terlihat bahwa temuan yang menarik dan penting untuk dipertimbangkan oleh pemerintah desa. Kelemahan pada jurnal ini adalah tidak membahas mengenai startegi-strategi yang diterapkan untuk meningkatkan penyelenggaraan Musrenbangdes yang menerapkan prinsip-prinsip *Collaborative Governance*.

Penelitian keempat dari Ahmad Sururi (2018) yang berjudul “*Collaborative Governance Sebagai Inovasi Kebijakan Strategis (Studi Revitalisasi Kawasan Wisata Cagar Budaya Banten Lama)*.” Jurnal ini menjelaskan mengenai pentingnya model *collaborative governance* dalam revitalisasi kawasan wisata cagar budaya Banten Lama. Dimana model yang diambil ada empat komponen yaitu, kondisi awal, komitmen, desain institusi, dan kondisi akhir. Kolaborasi yang terjalin sangat baik diantara pemangku kepentingan, dialog intensif dan pentaan kawasan penunjang wisata juga diidentifikasi sebagai faktor penting dalam keberhasilan revitalisasi tersebut.

Kekuatan pada penelitian ini, Penelitian ini memakai pendekatan deskriptif kualitatif serta memakai teknik pengumpulan data yang komprehensif. Mengidentifikasi isu-isu strategis dan prioritas dalam revitalisasi kawasan wisata cagar budaya Banten Lama yang memberikan pemahaman yang jelas mengenai tantangan yang dihadapi dan Solusi yang diusulkan. Artikel ini memberikan informasi tentang kolaboratif pengelolaan pariwisata di Teluk Kiluan, organisasi

dan manajemen, serta contoh *collaborative governance* di Amerika Serikat dan Korea, serta memberikan wawasan tambahan yang relevan untuk konteks revitalisasi kawasan wisata. Pada artikel ini juga memberikan penekanan pada pentingnya kreativitas birokrasi, kolaborasi antara pemerintah daerah, komitmen tinggi, intensitas komunikasi yang baik, dan partisipasi masyarakat sebagai faktor kunci dalam keberhasilan inovasi kebijakan, serta memberikan pandangan yang komprehensif tentang faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi *collaborative governance*.

Dari penelitian terdahulu tersebut didapatkan suatu tinjauan pustaka mengenai konsep kolaborasi itu sendiri, dan akan jelaskan sebagai berikut. Partisipasi masyarakat adalah merupakan sebuah konsep, model, dan sekaligus teori dalam pembangunan. Sebagai salah satu teori pembangunan, teori partisipasi juga meliputi kolaborasi masyarakat dalam pembangunan, dalam hal ini partisipasi dapat di katakan lebih luas pengertiannya di bandingkan kolaborasi, sedangkan kolaborasi merupakan bagian dari bentuk dari partisipasi. Berikut ini peneliti ingin menjelaskan secara berturut-turut teori partisipasi dan kolaborasi yang digunakan sebagai acuan teori untuk penelitian ini.

2. Teori Partisipasi Dalam Pembangunan

Partisipasi merupakan dasar utama pada tahapan pembangunan yang terfokus kepada masyarakat dan berkelanjutan yang merupakan suatu proses aktif yang terus berlanjut. Prinsip dari partisipasi ini adalah adanya masyarakat diikutsertakan secara langsung atau hanya didapatkan ketika masyarakat itu sendiri ikut serta dari awal, pada proses hingga saat perumusan hasil yang mana itu menjadi

suatu jaminan untuk menentukan apakah proses tersebut berjalan baik ataupun benar adalah dari keterlibatan masyarakat tersebut. Penentuan dari keberhasilannya suatu pembangunan ialah adanya masyarakat yang menjadi penerima program. Menurut Irma, partisipasi adalah kunci dari adanya pembangunan dan juga merupakan ciri dari pengelolaan dari *good governance* (Kusumah, 2018: 3). Peran dan juga partisipasi dari masyarakat adalah hal yang tidak lepas dari suatu pembangunan yang telah dijalankan atau direncanakan oleh pemerintah pada saat ini. Maka dari itu dilarang untuk kita melihat sebelah mata posisi masyarakat dalam meningkatkan pembangunan dalam kehidupan bernegara.

Pentingnya pendekatan partisipatif dalam pembangunan ini dikuatkan oleh pengalaman pembangunan desa. Pembangunan desa yang partisipatif dan kolaboratif ini sudah menjadi pendekatan yang mana semakin ditekankan dalam upaya untuk memajukan daerah pedesaan. Pendekatan ini pun melibatkan aktifitas partisipasi yang aktif dan juga kolaborasi antara pemerintah daerah, masyarakat lokal, sektor swasta dan juga organisasi non-pemerintah untuk perencanaan dan juga melaksanakan program pembangunan secara berkelanjutan. Menurut Sumane et al, pendekatan kolaboratif dan partisipatif semakin diakui sebagai suatu prasyarat untuk pembangunan yang cerdas dan juga berkelanjutan, di mana sumber daya lokal dan juga teknologi digital digunakan dengan cara-cara baru yang mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan integrasi sosial dan kesejahteraan, serta memperbaiki kondisi lingkungan (Ardhiyansyah et.al, 2023: 465).

Adanya pertukaran informasi, peran, fungsi serta tanggung jawab diantara pemangku kepentingan (*stakeholder*) dengan masyarakat sekitar pada suatu

program, dapat dikatakan bahwa program tersebut menggunakan pendekatan kolaboratif. Maka pendekatan kolaboratif sendiri merupakan salah satu pendekatan yang berkembang lebih akhir dan juga merupakan lanjutan pemikiran penerapan pendekatan partisipatif. Pembangunan desa yang partisipatif serta kolaboratif dapat membangun hubungan yang erat antara pemerintah daerah, masyarakat lokal, pihak swasta, dan organisasi non pemerintah. Dengan bekerja samanya seluruh sektor tersebut maka mereka dapat saling melengkapi dan juga memanfaatkan sumber daya yang dimiliki secara optimal.

Marzuki seperti dikutip oleh Sangian et.al., (2018:4) yang menyatakan bahwa karakteristik dari pendekatan partisipatif dalam pembangunan desa sendiri, yaitu:

- a. Terdapat kemitraan berdasarkan landasan kelarasan antara pemangku kepentingan atau *stakeholder* (pemerintah) serta masyarakat sekitar yang dilaksanakan pada tahap perencanaan dan juga pada tahap pelaksanaan.
- b. Masyarakat sekitar dapat membuat keputusan mereka sendiri serta memegang tanggung jawab penuh pada tahap perencanaan, implementasi, monitoring, hingga evaluasi program serta dukungannya dengan pemerintah.

Perencanaan partisipatif ini ternyata mempunyai pengaruh yang sangat penting dan juga positif, seperti yang telah dijelaskan Irma (2018) bahwa jika tingkatan partisipasi yang dimiliki oleh masyarakat tersebut terus bertambah maka dapat menimbulkan rasa kepemilikan yang kuat terhadap pembangunan-pembangunan yang terjadi disekitarnya. Dapat dikatakan bahwa hadirnya

partisipasi masyarakat yang dimiliki oleh pembangunan yang muncul dari masyarakat itu sendiri tanpa hadirnya suatu paksaan, adalah hal yang bisa membentuk program tersebut bisa berjalan baik dan juga efektif dan tepat pada sasaran, karena adanya keterlibatan dan partisipasi masyarakat pada program pembangunan.

3. Pengertian Kolaborasi

Kolaborasi merupakan istilah umum yang digunakan untuk menjelaskan suatu bentuk hubungan kerja sama yang dilakukan lebih dari satu pihak. Pengertian kolaborasi ini sudah banyak dijelaskan oleh para ahli berdasarkan sudut pandang yang berbeda. Sejatinya pengertian tersebut berasal dari prinsip yang sama yaitu kerja sama, berbagi tugas, kesamaan serta tanggung jawab. Secara umum kolaborasi sendiri merupakan suatu hubungan antar organisasi yang ikut serta dan saling menyepakati untuk mencapai tujuan dengan berbagi informasi, sumber daya, manfaat dan bertanggung jawab untuk mengambil keputusan bersama guna menyelesaikan permasalahan.

Gray (1989) menjelaskan bahwa kolaborasi sebagai proses berfikir dimana pihak ikut memandang aspek-aspek perbedaan dari suatu masalah dan mendapatkan Solusi dari perbedaan tersebut, serta keterbatasan pandangan mereka tentang apa yang bisa dilakukan. Lindeke et.al (2005:4) mendefinisikan bahwa kolaborasi adalah proses yang kompleks dan membutuhkan sharing pengetahuan yang direncanakan dan menjadi tanggung jawab. Serta menurut Kamus *Heritage Amerika* (2000), menjelaskan bahwa kolaborasi merupakan suatu proses kerja sama khususnya pada upaya penggabungan pemikiran.

Sejalan dengan pengertian kolaborasi, dapat diketahui bahwa kolaborasi merupakan bagian dari bentuk partisipasi, sehingga dijelaskan pula mengenai definisi partisipasi itu sendiri. Tawai dan Yusuf (2017: 9) mendefinisikan partisipasi masyarakat merupakan suatu proses keikutsertaan, keterlibatan sampai adanya kebersamaan dari masyarakat baik secara individu atau kelompok serta organisasi kemasyarakatan yang didasarkan dari adanya kesadaran masyarakat tersebut tanpa adanya suatu paksaan dari pihak-pihak tertentu. Isbandi menjelaskan partisipasi merupakan keikutsertaan masyarakat pada suatu tahapan pemecahan masalah termasuk potensi yang dipunyai masyarakat, pemilihan serta pengambilan suatu keputusan untuk solusi dari suatu masalah, pelaksanaan serta evaluasi pada perubahan yang ada (Kusumah, 2018: 3).

Hamidjoyo (1988) dalam (Sigalingging dan Warijo, 2014: 120) menjelaskan bahwa pengertian partisipasi secara operasional konsep partisipasi dalam pembangunan dapat ditunjukkan melalui beberapa ciri-ciri sebagai berikut:

1. Masyarakat turut bertanggung jawab ikut serta memikul beban pembangunan
2. Masyarakat menjadi penerima manfaat utama dari pembangunan partisipasi
3. Masyarakat memiliki peluang kesempatan untuk berkreasi dalam aktivitas penyelenggaraan pembangunan dengan memanfaatkan sumber daya lokal

Tujuan kolaborasi dan partisipasi itu sendiri sejatinya sama yaitu untuk tercapainya tujuan bersama dengan saling membantu antara satu dengan yang

lainnya. Sejalan dengan penjelasan Abdulsyani (2007:156) bahwa kolaborasi adalah bentuk proses sosial dengan aktivitas tertentu yang ditunjukkan untuk mencapai tujuan bersama dengan saling membantu dan saling memahami aktivitas masing-masing. Istiqomah (2023:27) menjelaskan bahwa tujuan dari kolaborasi itu sendiri untuk mempercepat tercapainya tujuan bersama. Dalam proses pencapaian tujuan tidak dianjurkan melakukan memetakan tugas-tugas yang diemban. Sejalan dengan penjelasan Nawawi (1984:7) bahwa kolaborasi merupakan usaha tercapainya tujuan bersama yang ditetapkan dengan pembagian tugas, tidak pengkotakan kerja tetapi sebagai satu kesatuan kerja yang terarah untuk tujuan bersama.

Selama dua dekade terakhir telah berkembangnya strategi pemerintahan baru yaitu pemerintahan kolaboratif. Model tata kelola ini menggabungkan berbagai pemangku kepentingan dalam forum bersama dengan badan-badan publik untuk terlibat dalam pengambilan keputusan yang berorientasi pada keputusan bersama. Ansel dan Gash (2007:544) mendefinisikan tata kelola kolaboratif adalah suatu pengaturan pemerintahan dimana satu atau lebih lembaga publik secara langsung melibatkan pemangku kepentingan non-negara dalam proses pengambilan keputusan kolektif yang formal, beorientasi pada keputusan bersama dan deliberatif dan bertujuan untuk membuat atau melaksanakan kebijakan public atau mengelola program atau aset publik.

4. Kolaborasi Sebagai Salah Satu Ciri-ciri atau Karakteristik Partisipasi

Samsura dalam Hidayat (2018:59) menyebutkan Ciri-ciri atau karakteristik partisipatif yaitu 1. Adanya melibatkan seluruh *stakeholders* dan masyarakat, 2. Adanya upaya pembangunan institusi masyarakat yang kuat, 3. Adanya proses politik melalui negosiasi atau urun rembuk yang pada akhirnya mengarah pada pembentukan kesepakatan bersama, 4. Adanya usaha pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan pemberdayaan kolektif yang merupakan bagian dari proses demokratisasi.

Menurut Marschall (2006) dalam Rahmawati et.al., (2021: 594) ada tiga indikator partisipasi masyarakat, yaitu (1) Adanya kelompok yang mewadahi partisipasi masyarakat, (2) Adanya potensi lokal yang meliputi Sumber Daya Manusia (SDM) dan Sumber Daya Alam (SDA) untuk berpartisipasi pada suatu proses, (3) Masyarakat memiliki kesempatan menyampaikan pendapat saat proses pengambilan keputusan. Dan menurut Oakley (1991:9) dalam Rahmawati et.al., (2021: 594) ada lima indikator partisipasi, yaitu: (1) Memiliki kontribusi, (2) Memiliki pengorganisasian, (3) Peran dan aksi masyarakat, (4) Hadirnya motivasi masyarakat, (5) Tumbuhnya rasa tanggung jawab masyarakat.

Dari berbagai macam indikator partisipasi sejatinya indikator terpenting adalah adanya pembangunan yang pada hakikatnya ditujukan untuk manusia. Dalam hal ini masyarakat dipandang memiliki dimensi penting yaitu kemanusiaan sebagaimana dinyatakan oleh Cohen dan Uphoff (1977) dan ditegaskan kembali oleh Michael M. Cernea pada buku “Mengutamakan Manusia di Dalam

Pembangunan” (1988). Pembangunan haruslah ditujukan kepada manusia, karena manusia lah yang menjadi pemanfaat utama dari pembangunan.

Pendekatan kolaboratif merupakan salah satu penajaman dari pendekatan partisipatif. Tasruddin (2015: 56) menjelaskan bahwa, partisipasi masyarakat dalam suatu pembangunan ini adalah salah satu karakteristik dari pendekatan kolaboratif itu sendiri. Ciri khas dari pendekatan kolaboratif itu sendiri adalah adanya proses saling belajar (*sharing*), terkhusus dalam berbagi informasi (Qodriyatun,2019:43). Menekankan pentingnya kerjasama yang didasarkan oleh komunikasi antarpemangku kepentingan juga merupakan karakteristik pendekatan kolaboratif (Healey, 1996 dalam Sufianti et.al., 2013:134). Lebih lanjut, Emerson dan Nabatchi (2015) dalam (Newig et al., 2017) menjelaskan bahwa kolaborasi dalam pembangunan itu dapat dilihat sebagai suatu tata kelola dimana ada proses dan ada struktur nya. Saputra (2020:90) menjelaskan bahwa pola-pola kolaborasi diantara lain kolaborasi multipihak, kolaborasi berbasis aset, kolaborasi berbasis jaringan, kolaborasi berbasis proyek.

5. Bentuk-Bentuk Kolaborasi

Saputra (2020:90) menjelaskan bahwa bentuk berlangsungnya kolaborasi yaitu:

1. Kolaborasi Multipihak, yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan seperti pemerintah, organisasi masyarakat sipil dan lain-lain. Seperti contoh Forum Komunikasi Pembangunan Daerah (FKPD)

2. Kolaborasi Aset, yang memanfaatkan aset atau dana serta sumber daya yang dimiliki berbagai pihak. Seperti contoh dana desa dan keahlian pengetahuan masyarakat
3. Kolaborasi Tempat, yang memfokuskan pada wilayah serta komunitas tertentu. Seperti contoh program kampung KB, program kotaku
4. Kolaborasi Jaringan, yang membangun kolaborasi antar jaringan komunikasi dan kerjasama antar berbagai pihak. Seperti contoh platform online untuk partisipasi masyarakat dan forum komunitas online
5. Kolaborasi Proyek, yang bekerja sama untuk menyelesaikan proyek tertentu, contohnya program pembangunan infrastruktur, program pemberdayaan masyarakat.

Selain bentuk-bentuk kolaborasi, peneliti pun juga membahas mengenai bentuk bentuk dari partisipasi itu sendiri. Bentuk-bentuk partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan menurut Sutarta dalam Tawai dan Yusuf (2017: 22). adalah sebagai berikut:

- a. Partisipasi pada tahap pengambilan keputusan, merupakan suatu keikutsertaan yang dijalankan oleh masyarakat pada proses kegiatan yang direncanakan, dan juga dipersiapkann serta menetapkan ketentuan yang nantinya digunakan jika kegiatan tersebut telah berjalan.

- b. Partisipasi pada pelaksanaan, merupakan suatu keikutsertaan yang dilakukan saat kegiatan tersebut telah atau sedang berjalan
- c. Partisipasi pada tahap menikmati hasil dan manfaat, adalah suatu keikutsertaan dan partisipasi masyarakat dalam menerima manfaat ataupun keuntungan yang mereka rasakan dari kegiatan tersebut
- d. Partisipasi pada evaluasi, merupakan keikutsertaan masyarakat yang dilihat saat selesainya kegiatan atau program, seperti respon masyarakat yang dapat diarikan sebagai umpan balik (*feedback*) guna untuk masukan bagi suatu kegiatan sejenis dan juga rencana tindak selanjutnya.

Selain Cohen dan Uphoff, Sutarta juga menjelaskan mengenai bentuk-bentuk partisipasi, penjelasan Sutarta mengenai bentuk partisipasi pada dasarnya sama atau dalam artian saling menguatkan dengan penjelasan bentuk partisipasi Cohen dan Uphoff

6. Proses Kolaborasi

Model proses tata kelola kolaboratif terkadang menggambarkan kolaborasi sebagai suatu pengembangan secara bertahap. Susskind dan Cruikshank (1987) menjelaskan bahwa proses pembangunan konsensus memiliki fase pranegosiasi, fase negosiasi, dan fase implementasi, Gray (1989) mendefinisikan proses kolaborasi tiga langkah: Penetapan masalah, Penetapan arah, 3. Implementasi. Edelenbos (2005) mengidentifikasi proses tiga langkah yang mencakup persiapan,

pengembangan kebijakan, dan pengambilan keputusan, dengan setiap langkah memiliki beberapa tahapan (Ansel & Gash, 2007:557). Proses ini penting di seluruh tahapan kolaborasi

Seluruh tata kelola kolaboratif dibangun berdasarkan dialog tatap muka antar pemangku kepentingan. Sebagai proses yang berorientasi pada kesepakatan bersama komunikasi yang erat dapat dimungkinkan melalui dialog langsung, diperlukan bagi para pemangku kepentingan untuk mengidentifikasi peluang demi keuntungan bersama. Giliam et al (2002) dalam (Ansel & Gash, 2007: 558) menjelaskan bahwa dialog tatap muka ini merupakan inti dari proses membangun kepercayaan, saling menghormati, pemahaman bersama dan komitmen terhadap proses tersebut.

Selain dialog tatap muka, Ansel & Gash (2007) juga menyarankan bahwa proses kolaboratif bukan hanya tentang negosiasi tetapi juga tentang membangun kepercayaan diantara pemangku kepentingan. Membangun kepercayaan merupakan fase yang terpisah dari dialog dan negosiasi mengenai masalah-masalah substantif. Namun para pemimpin kolaboratif yang baik menyadari bahwa mereka harus membangun kepercayaan di antara para aktor yang terlibat.

Alexander et al (1998) menjelaskan bahwa tingkat komitmen pemangku kepentingan terhadap kolaborasi merupakan variabel penting dalam menjelaskan keberhasilan atau kegagalan (Ansel & Gash, 2007:559). Dalam survei terhadap kelompok kolaboratif Amerika dan Australia, Margerum (2002) menemukan bahwa “komitmen anggota” adalah faktor terpenting yang memfasilitasi kolaborasi (Ansel & Gash, 2007:559). Komitmen tentu saja berkaitan erat dengan motivasi

awal untuk berpartisipasi dalam tata kelola kolaboratif. Tata kelola kolaboratif menggeser kepemilikan pengambilan keputusan dari lembaga ke pemangku kepentingan yang bertindak secara kolektif (Ansel & Gash, 2007: 559). Kepemilikan menyiratkan tanggung jawab bersama atas proses tersebut.

Saling ketergantungan yang tinggi di antara para pemangku kepentingan kemungkinan besar akan meningkatkan komitmen terhadap kolaborasi. Namun hal ini dapat meningkatkan insentif untuk bertindak secara manipulative dan kooptif. Godaan-godaan ini mungkin dapat diatasi jika kolaborasi bukan merupakan kesepakatan yang terjadi satu kali saja namun bergantung pada kerja sama yang berkelanjutan. Strategi tata kelola kolaboratif sangat cocok untuk situasi yang memerlukan kerja sama berkelanjutan.

Tett et al (2003) dalam (Ansel & Gash, 2007:560) menjelaskan bahwa pada titik tertentu dalam proses kolaboratif, para pemangku kepentingan harus mengembangkan pemahaman bersama tentang apa yang dapat mereka capai bersama. Pemahaman bersama digambarkan secara beragam dalam literatur sebagai misi bersama, kesamaan, tujuan bersama, visi bersama dan ideologi bersama. Pemahaman bersama juga dapat berarti kesepakatan mengenai definisi masalah atau mungkin berarti kesepakatan mengenai pengetahuan relevan yang diperlukan untuk mengatasi suatu masalah. Perkembangan pemahaman bersama dapat dilihat sebagai bagian dari proses pembelajaran kolaboratif yang lebih besar.

F. Kerangka Pemikiran

Kolaborasi dan partisipasi masyarakat adalah dua hal yang saling terkait dalam program pembangunan. Kolaborasi adalah kerja sama yang dilakukan oleh

dua pihak atau lebih untuk mencapai tujuan bersama. Partisipasi masyarakat adalah keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan. Bentuk dari kolaborasi dalam pembangunan partisipatif meliputi kolaborasi multipihak, kolaborasi aset, kolaborasi tempat, kolaborasi jaringan dan kolaborasi proyek.

Partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan dapat meningkatkan keberhasilan program. Partisipasi memungkinkan masyarakat untuk terlibat dalam pengambilan keputusan, perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring program. Sehingga dapat meningkatkan rasa kepemilikan dan tanggung jawab masyarakat terhadap program, sehingga meningkatkan efektivitas dan keberlanjutannya. Kolaborasi pun juga menjadi kunci keberhasilan partisipasi. Kolaborasi memungkinkan berbagai pihak untuk saling berbagi pengetahuan, sumber daya dan pengalaman serta membangun rasa saling percaya dan kerjasama.

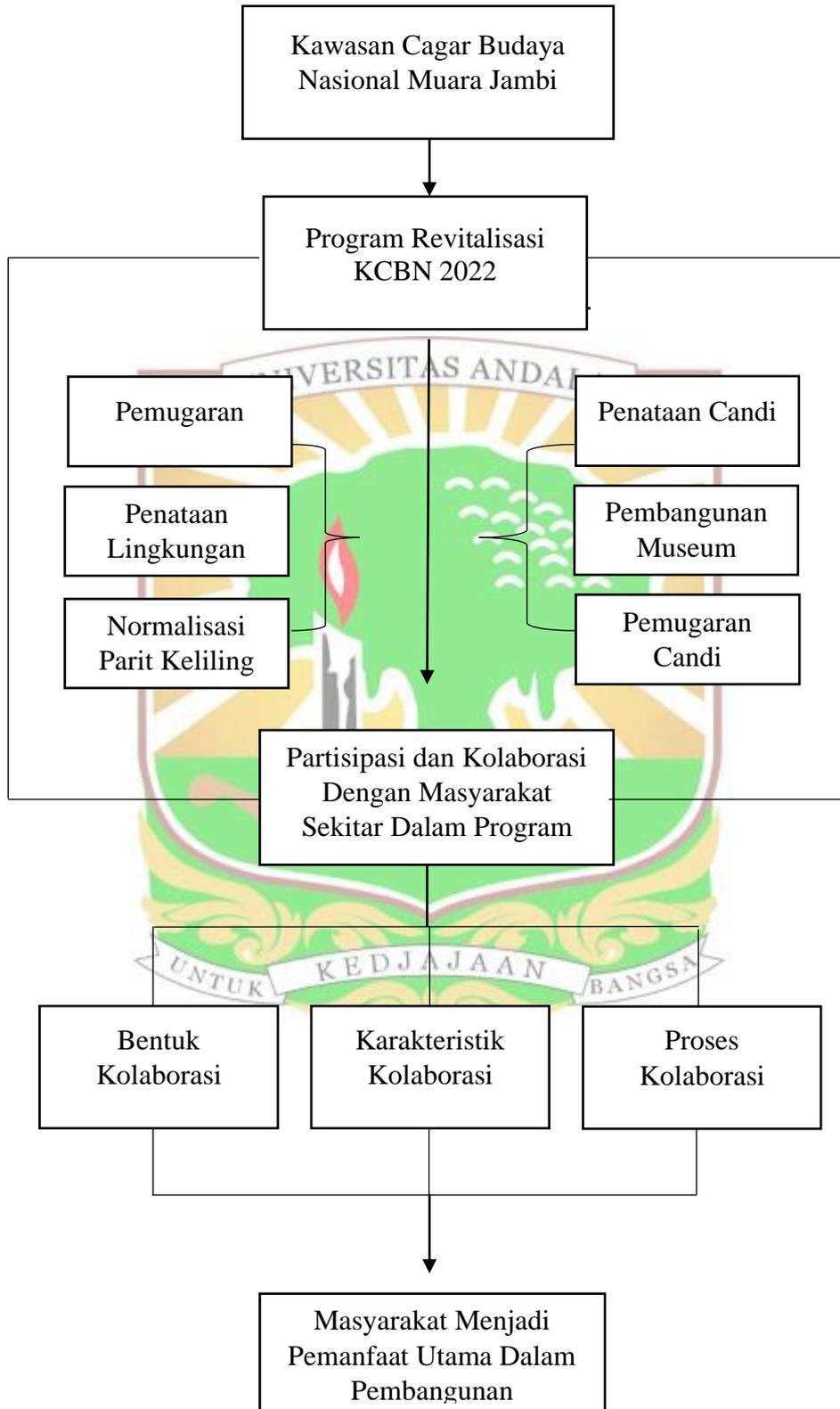
Pembangunan desa yang partisipatif dan kolaboratif sudah menjadi pendekatan yang mana semakin ditekan dalam upaya untuk memajukan daerah pedesaan. Pendekatan pun melibatkan aktifitas partisipasi yang aktif dan juga kolaborasi antara pemerintah daerah, masyarakat lokal, sektor swasta dan juga organisasi non pemerintah. Adanya pertukaran informasi, peran, fungsi serta tanggung jawab diantara pemangku kepentingan (*stakeholder*) dengan masyarakat sekitar pada suatu program, sehingga dapat dikatakan bahwa program tersebut menggunakan pendekatan kolaboratif. Pembangunan yang partisipatif dan kolaboratif ini dapat membangun hubungan yang erat antara pemerintah daerah, masyarakat lokal, pihak swasta dan organisasi non pemerintah.

Dari tinjauan pustaka yang sudah dijelaskan, peneliti mengambil konsep dari Saputra (2020:90) yang mengklasifikasikan beberapa bentuk kolaborasi, yaitu (1). Kolaborasi Multipihak yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan seperti pemerintah, organisasi masyarakat sipil. (2). Kolaborasi Aset, yang memanfaatkan aset atau dana serta sumber daya yang dimiliki berbagai pihak. (3). Kolaborasi Tempat, yang memfokuskan pada wilayah serta komunitas tertentu. (4). Kolaborasi Jaringan, yang membangun kolaborasi antar jaringan komunikasi dan kerjasama antar berbagai pihak. (5). Kolaborasi Proyek, yang bekerja sama untuk menyelesaikan proyek tertentu.

Konsep yang diambil mengenai karakteristik kolaboratif pun yaitu dari pernyataan Marschall (2006) dalam Rahmawati et.al (2021: 594). Ada tiga indikator dari partisipasi masyarakat itu sendiri, yaitu (1) Adanya kelompok yang mewadahi partisipasi masyarakat, (2) Adanya potensi lokal yang meliputi Sumber Daya Manusia (SDM) dan Sumber Daya Alam (SDA) untuk berpartisipasi pada suatu proses, (3) Masyarakat memiliki kesempatan menyampaikan pendapat saat proses pengambilan keputusan.

Serta konsep proses kolaborasi yang diambil dari pemikiran Ansel & Gash (2007: 558) yang menyatakan bahwa seluruh tata kelola kolaboratif di bangun berdasarkan tatap muka, membangun kepercayaan, komitmen pemangku kepentingan, saling ketergantungan serta pemahaman bersama. Dari berbagai macam indikator partisipasi sejatinya indikator yang terpenting adalah adanya pembangunan yang pada hakikatnya ditujukan untuk manusia.

**Bagan 1.
Kerangka Pemikiran**



G. Metodologi Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini, penulis memakai metode penelitian kualitatif serta memakai pendekatan deskriptif. Menurut Moleong (2005:4), pendekatan kualitatif deskriptif merupakan pendekatan penelitian yang menggunakan data-data yang mana data tersebut dikumpulkan berbentuk kata-kata, gambar, dan bukan berupa angka. Data yang didapatkan tersebut, diperoleh dari adanya kegiatan wawancara, catatan lapangan, foto dan video yang dapat berupa dokumentasi pribadi, serta memo atau catatan dan dokumentasi lain.

Pada penelitian juga memakai pendekatan studi kasus. Studi kasus merupakan suatu strategi pada penelitian kualitatif yang telah didefinisikan oleh Creswell (2016) sebagai suatu strategi kualitatif yang mana peneliti mengkaji suatu program, kejadian, aktivitas, proses baik satu ataupun lebih secara mendalam. Miller dan Pawito (2017) juga menjelaskan mengenai studi kasus yang disebutkan sebagai suatu analisis yang mendalam pada satu bahkan lebih komunitas, organisasi, ataupun individu tentang bagaimana mereka memahami suatu peristiwa yang terjadi dihidupnya.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kawasan Cagar Budaya Nasional (KCBN) Muara Jambi. Dibeberapa dokumen resmi ada juga yang menuliskan nama lokasi Muara Jambi dalam satu kata, yaitu Muarajambi untuk menjaga konsistensi penulisan, di dalam skripsi ini peneliti menggunakan penulisan Muara Jambi. Muara Jambi adalah nama dari salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Jambi,

namun sebenarnya ada pula penggunaan nama Muara Jambi yang menunjuk pada nama desa.

Menurut Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 259/M/2013 tentang Penetapan Satuan Ruang Geografis Muara Jambi Sebagai Kawasan Cagar Budaya Peringkat Nasional, bahwa Kawasan Cagar Budaya Nasional (KCBN) Muara Jambi berada di dua kecamatan yaitu Kecamatan Maro Sebo dan Kecamatan Taman Rajo. KCBN yang berlokasi di Kecamatan Maro Sebo terdapat di empat Desa yaitu Desa Muara Jambi, Desa Danau Lamo, Desa Kemingking Luar dan Desa Dusun Baru sedangkan KCBN yang terletak di kecamatan Taman Rajo terdapat di dua Desa yaitu Desa Kemingking Dalam dan Desa Dusun Mudo, adapun yang menjadi zona inti dari KCBN ini berada di kecamatan Maro Sebo yang berada di empat desa yang telah disebutkan diatas. Dilokasi ini intensitas interaksi antara masyarakat dengan KCBN lebih tinggi, interaksi antara masyarakat desa di ke-4 desa dengan KCBN bahkan juga mencakup adanya kolaborasi antara masyarakat desa dengan pemerintah untuk upaya pelestarian. Maka dari itu penelitian mengenai partisipasi ini difokuskan di empat desa di Kecamatan Maro Sebo yang merupakan lokasi pusat KCBN.

Berdasarkan informasi awal yang peneliti peroleh, program revitalisasi yang sudah berjalan di KCBN Muara Jambi ini tidak hanya sekitar kawasan saja. Program Revitalisasi direncanakan untuk ke delapan desa sekitar, namun untuk sekarang program ini baru berjalan di empat desa sekitar, yaitu Desa Danau Lamo, Desa Baru, Desa Muara Jambi dan Desa Kemingking Luar. Untuk empat desa lain

nya masih ditahap perencanaan. Sehingga penulis mengambil empat desa ini untuk menjadi lokasi penelitian.

3. Informan Penelitian

Teknik yang digunakan peneliti dalam menentukan informan ialah memakai teknik sampel bertujuan (*purposive sampling*). Purposive sampling adalah teknik pengambilan informan sumber data dengan pertimbangan tertentu, seperti orang tersebut dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan (Sugiyono, 2009:300). Peneliti menggunakan teknik ini karena peneliti mengambil informan yang mengetahui tentang masalah yang akan diteliti. Namun, tidak menutup kemungkinan jika saat di lokasi penelitian peneliti akan memakai teknik *snowball* dengan bertambahnya informan yang dibutuhkan sesuai kebutuhan penelitian.

Menurut Koentjaraningrat (1993: 130), informan terdiri key informan (informan kunci) dan informan biasa. Kriteria informan kunci adalah seseorang dengan pengetahuan yang luas dan mendalam terkait masalah penelitian, sedangkan informan biasa adalah orang yang dapat memberikan informasi secara umum. Untuk lebih jelas, berikut adalah tabel informan kunci dan informan biasa penelitian

Tabel 1.
Informan Kunci

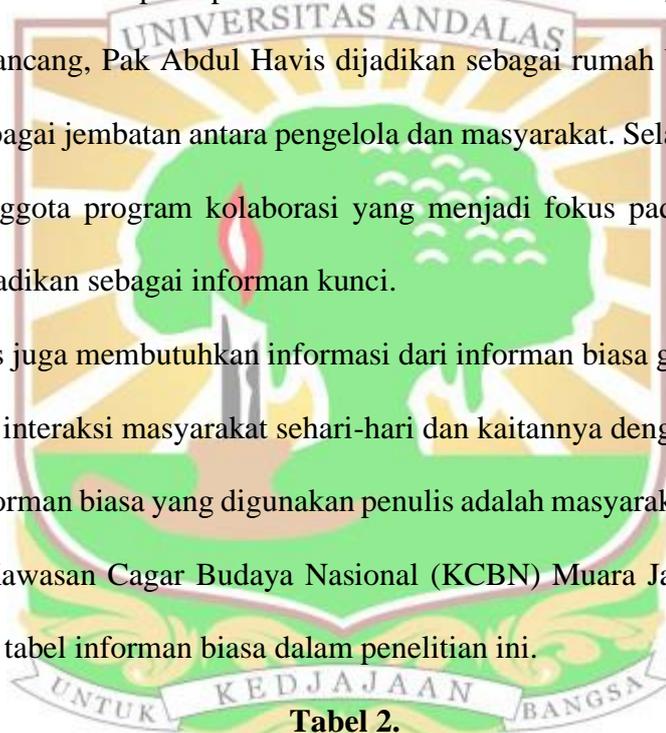
No	Nama Informan	Usia	Status
1	Rhis Eka	47	Pegawai Badan Pelestarian Kebudayaan Wilayah V
2	Abdul Havis (Ahok)	47	Penggiat Budaya Masyarakat Sekitar
3	Jamila	54	Anggota UMKM Paduka
4	Yusni	56	Anggota Anyaman Pandan Desa Danau Lamo

5	Sukirman	43	Anggota Taman Kreatif “Lubuk Penyengat”
6	Dodi Chandra	38	Anggota Handicraft Kemingking Luar

Sumber: Data Primer 2024

Pada tabel tersebut, dapat dilihat penelitian memakai enam informan kunci, yaitu salah satu Pegawai Badan Pelestarian Kebudayaan Wilayah V. Selain itu, penulis juga menjadikan salah satu penggiat budaya masyarakat disana untuk menjadi informan kunci pada penelitian ini. Hal ini dikarenakan, setiap program yang akan dirancang, Pak Abdul Havis dijadikan sebagai rumah bagi masyarakat sekitar dan sebagai jembatan antara pengelola dan masyarakat. Selain itu, beberapa perwakilan anggota program kolaborasi yang menjadi fokus pada penelitian ini yang penulis jadikan sebagai informan kunci.

Penulis juga membutuhkan informasi dari informan biasa guna mengetahui kebiasaan dan interaksi masyarakat sehari-hari dan kaitannya dengan kawasan dan pengelola. Informan biasa yang digunakan penulis adalah masyarakat dari ke empat desa sekitar Kawasan Cagar Budaya Nasional (KCBN) Muara Jambi. Untuk itu, berikut adalah tabel informan biasa dalam penelitian ini.



Tabel 2.
Informan Biasa

No	Nama Informan	Usia	Status
1	Siti Badiyah	45	Ketua PKK Desa Bari
2	Ibrahim	70	Pemilik Lahan
3	Ashitar	50	Pekerja Pemugaran
4	Udin	50	Pedagang di Sekitar Kawasan
5	Awi	61	Pekerja Pemugaran
6	Ruslan	66	Anggota Anyaman Pandan Desa Danau Lamo
7	Adi Sukamto	60	Masyarakat Desa Baru
8	Kaspul Anwar	57	Masyarakat Desa Muara Jambi
9	Nasir	58	Ketua RT Desa Baru

10	Yusniati	46	Anggota UMKM Paduka
11	Sidar	46	Masyarakat Desa Danau Lamo
12	Rita	25	Pegawai Kantor Desa Baru
13	Ardi	38	Anggota UMKM <i>Handicraft</i>
14	Roni	39	Pegawai Kantor Desa Danau Lamo
15	Abdul	34	Masyarakat Desa Kemingking Luar
16	Hendra	32	Tenaga Keamanan

Sumber: Data Primer 2024

Pada tabel diatas, dapat dilihat penulis menemukan 16 nforman biasa. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, informan biasa yang digunakan adalah masayrakat dari ke empat desa sekitar kawasan. Namun, penulis menemukan bahwa beberapa warga merupakan orang pendatang. Informan ini sangat membantu penulis dalam menjelaskan aktivitas masyarakat sehari-hari, interaksi masyarakat dengan kawasan sampai bagaimana kebermanfaatan kawasan di kehidupan masyarakat.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, studi dokumentasi dan studi kepustakaan, yang mana diharapkan bisa mendapatkan informasi dan juga data-data untuk bukti dari penelitian.

a. Observasi

Zainal Arifin dalam Kristanto (2018) mendefinisikan observasi adalah tahap dimulainya suatu pengamatan lalu pencatatan yang bersifat sistematis, logis, objektif serta rasional terhadap berbagai macam fenomena yang sebenarnya terjadi ataupun situasi buatan. Teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui observasi langsung pada penelitian ini dilakukan melalui pengamatan secara langsung di

Kawasan Cagar Budaya Nasional Muara Jambi yang menjadi objek utama dalam penelitian ini.

Observasi yang akan peneliti lihat yaitu observasi apa yang sedang di kerjakan, observasi yang akan direncanakan, observasi sumber potensi lokal yg akan digunakan, observasi pertemuan seperti pertemuan rutin, pertemuan warga dan sebagainya, observasi tahapan pengerjaan yg sedang berjalan, observasi situasi disaat masyarakat terlibat dalam program.

b. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data untuk mendapatkan suatu informasi yang telah didapatkan dari sumber data langsung dengan cara percakapan dan tanya jawab secara langsung. Wawancara pada penelitian kualitatif ini bersifat mendalam karena memang pada dasarnya ingin mengeksplorasi informasi secara keseluruhan dan jelas dari informasi (Satori dan Komariah, 2017). Metode wawancara dipakai untuk berinteraksi secara langsung ataupun tidak langsung kepada masyarakat yang menjadi objek kajian utama dari penelitian dan juga masyarakat yang memiliki pengetahuan dan juga mengetahui secara jelas masalah yang terjadi di masyarakat tersebut.

Peneliti pun menyusun beberapa pertanyaan guna untuk diajukan kepada informan sebagai bentuk dari wawancara itu sendiri. Wawancara tersebut dilakukan dengan mendatangi secara langsung ke informan tersebut dan menanyakan hal yang terkait guna untuk mendapatkan informasi tentang partisipasi masyarakat dan juga mengidentifikasi potensi sumber daya lokal

c. Studi Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu catatan dari peristiwa yang berlalu, dokumentasi berbentuk tulisan, gambar bahkan karya-karya bersejarah dari seseorang. Dokumentasi ini adalah pelengkap dari adanya metode observasi dan wawancara yang telah digunakan dalam penelitian ini. Dokumentasi juga merupakan teknik dari pengumpulan data guna sebagai pelengkap serta pendukung dari data primer yang memberikan suatu data berbentuk foto, video, rekaman suara, ataupun catatan lapangan dan juga berupa sumber-sumber yang berhubungan dengan penelitian tersebut. Dokumentasi ini pun diambil pada saat penelitian berlangsung atau setelah wawancara.

d. Studi Kepustakaan

Penelitian ini melibatkan studi kepustakaan. Studi kepustakaan ini adalah rangkaian kegiatan guna memperoleh informasi terkait permasalahan dan tujuan penelitian. Studi kepustakaan dapat diperoleh dari buku, tulisan ilmiah, tesis, skripsi, situs web, artikel, dan sumber lainnya yang menunjang permasalahan dan tujuan penelitian. Studi kepustakaan dilakukan untuk memastikan bahwa data yang diperoleh selama penelitian akurat dan sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian.

5. Analisis Data

Susan Stainback dalam Sugiyono (2014:244) telah menjelaskan mengenai analisis data merupakan hal yang kritis pada proses dan tahapan penelitian kualitatif. Analisis data digunakan untuk memahami bagaimana hubungan dan juga konsep dalam data tersebut sehingga dapat dikembangkan dan juga di evaluasi.

Kegiatan dalam analisis data kualitatif ini dilakukan secara interaktif dan terus berlangsung sampai tuntas, hingga data tersebut jenuh. Aktivitas dalam analisis data yaitu data *reduction*, data *display*, dan *conclusion drawing/verification*.

a. Reduksi data/ *reduction*

Pengelompokan data sesuai dengan ciri atau karakter, pada reduksi data ini sering disebut juga sebagai penyederhanaan

b. *Display* data atau penampilan data

Pada tahap ini hasil data tersebut bisa dibuat dalam bentuk narasi

c. *Interpretasi* data

Tahap ini hanya diisi dengan akal sehat bersama, sesuai dengan analisis etik yang didasarkan oleh teori dan analisis emik didasarkan oleh perilaku.

Data tersebut yang telah dilakukan dengan cara observasi, wawancara serta studi pustaka di lapangan selanjutnya dianalisis secara teknik kualitatif.

6. Proses Penelitian

Penulis pertama kali turun ke lapangan adalah pada hari Rabu (13 Maret 2024) setelah memperoleh surat pengantar izin penelitian dari bagian Akademik dan Kemahasiswaan FISIP Universitas Andalas. Penulis mengadakan kunjungan Ke Kantor Desa Danau Lamo, Kantor Desa Baru, Kantor Desa Muara Jambi, Kantor Desa Kemingking Luar untuk mengantarkan surat pengantar izin penelitian kepada ke-4 kepala desa tersebut agar memperoleh izin di lokasi tersebut. Waktu tempuh penulis menuju lokasi penelitian adalah \pm 1 jam. Saat itu, penulis tiba di lokasi pada pukul 09.00 WIB. Dalam kunjungan tersebut, penulis diterima baik dan mendapatkan izin untuk dapat melaksanakan penelitian.

Penelitian dilakukan kurang lebih dua bulan dengan mengamati kehidupan sosial budaya dan ekonomi masyarakat disana serta mewawancarai mengenai program kolaborasi yang sudah berjalan ataupun yang akan berjalan. Penelitian ini dilaksanakan mulai dari pertengahan bulan Maret sampai akhir bulan April. Dalam kegiatan penelitian tersebut, penulis mengumpulkan data dimulai dengan menggunakan teknik studi literatur, kemudian melakukan observasi dan wawancara saat berada di lokasi penelitian. Penulis melakukan pengumpulan data juga menggunakan teknik triangulasi agar memperoleh data yang kredibel. Dalam pengumpulan data, penulis juga dibantu dengan adanya 22 informan penelitian.

Penelitian secara keseluruhan berjalan dengan lancar dan baik. Namun penulis mengalami beberapa kendala saat kegiatan tersebut. Kendala nya yaitu, disaat proses penelitian ada dua desa yang pada saat itu mengalami banjir musiman sehingga akses jalan menuju dua desa tersebut tertutup. Dan penulis pun harus menunggu sampai banjir tersebut surut, sehingga hal tersebut lah yang membuat waktu penelitian penulis sedikit terhambat. Selain itu karena lokasi nya yang jauh sehingga membutuhkan waktu dan tenaga yang begitu besar. Selama dua bulan tersebut juga terpotong waktu Hari Raya Idul Fitri sehingga kegiatan penelitian pun harus diundur sampai selesainya Hari Raya Idul Fitri.

Selain itu, dikarenakan memang lokasi penelitian yang penulis ambil ada empat desa sehingga membutuhkan waktu yang sedikit lama untuk menyelesaikan penelitian ini. Menyesuaikan waktu dengan informan juga menjadi salah satu kendala penulis saat penelitian. Dan juga ada beberapa informan yang usia nya sudah tidak muda lagi sehingga penulis susah untuk mendapatkan informasi,

sehingga penulis memerlukan waktu lagi untuk mencari informan mana yang sekiranya penulis mendapatkan data yang diperlukan.

